

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah nusantara dan dengan tujuan memberikan rasa aman dan makmur bagi rakyat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah, salah satunya melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa suatu daerah harus mampu mengelola sumber daya keuangannya, mengatur, dan menggunakannya untuk mendukung pembangunan pemerintah dan daerah tersebut. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memungkinkan pihak pemerintah daerah agar lebih bisa memajukan serta meningkatkan daerahnya secara mandiri, menggali kemampuan yang dapat menaikkan penghasilan wilayah itu sendiri. Salah satu yang menjadi aspek keberhasilan suatu daerah ialah peningkatan pada pendapatan asli daerah (PAD). (Siregar dan Kusmilawaty, 2022)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal pemerintah daerah. Peningkatan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh suatu daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diperoleh dari beberapa sektor diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Gunawan dan Suebah, 2022). Pentingnya PAD tidak hanya terletak pada jumlah yang diterima, tetapi juga pada kemandirian keuangan daerah. Dengan PAD yang optimal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan membiayai berbagai program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber utama PAD yang langsung dikelola oleh pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan serta penyediaan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Pajak daerah mencerminkan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, seperti penggunaan energi, transaksi tanah dan bangunan, serta kepemilikan aset. Sementara itu, retribusi daerah berkaitan dengan imbalan atas pelayanan atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Kedua jenis pendapatan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu dikelola dengan baik dan maksimal. Dengan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak serta retribusi daerah, kita dapat melihat sejauh mana potensi pendapatan telah dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian keuangan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dimaksudkan untuk membiayai kepentingan daerah dan masyarakat secara umum, dan berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Dari berbagai jenis pajak daerah yang dipungut, terdapat tiga jenis pajak yang konsisten memberikan kontribusi terbesar

terhadap PAD Kota Tegal. Berdasarkan data realisasi beberapa tahun terakhir, terdapat tiga jenis pajak daerah yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar, yaitu Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketiga pajak ini mencerminkan potensi ekonomi yang berbeda. Pajak Penerangan Jalan menggambarkan konsumsi energi listrik, BPHTB mencerminkan aktivitas transaksi properti, dan PBB mencerminkan kepemilikan atas tanah dan bangunan yang tersebar di seluruh wilayah kota.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan yang berpotensi dikembangkan. Meskipun kontribusinya terhadap PAD masih lebih kecil dibandingkan pajak daerah, retribusi daerah tetap memiliki peran strategis dalam mendukung layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas jasa atau layanan yang diberikan kepada masyarakat (Nabila and Jannah, 2022). Perbedaan mendasar antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada sifat kontraprestasi. Pada pajak daerah, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung atas pembayaran yang dilakukan, sedangkan pada retribusi daerah, pembayar retribusi mendapatkan jasa atau pelayanan langsung dari pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan atas retribusi yang dibayarkan.

Efektivitas menyajikan suatu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan (Dwi, Firdaus dan Kartika, 2024). Dalam konteks pemerintahan, efektivitas sering dilakukan untuk mengevaluasi

penggunaan sumber daya, pencapaian hasil, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sedangkan Pengertian kontribusi adalah sumbangan yang diberikan seseorang sebagai upaya membantu kerugian atau membantu kekurangan terhadap hal yang dibutuhkan. (Rahman Utama dan Abidin, 2022). Analisis efektivitas akan memberikan gambaran mengenai kemampuan Pemerintah Kota Tegal dalam merealisasikan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang direncanakan. Sementara analisis kontribusi akan menunjukkan seberapa besar peran atau sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total PAD.

Badan Keuangan Daerah berperan sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas penerimaan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, dalam beberapa tahun terakhir terdapat kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tegal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran maupun kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Meskipun pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber pendapatan yang penting, efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD perlu dievaluasi secara berkala. Beberapa jenis pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan belum mencapai target yang ditetapkan, sementara realisasi dari beberapa jenis retribusi daerah juga masih fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, kontribusi

dari masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal belum teridentifikasi dengan jelas, sehingga Pemerintah Kota Tegal mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas kebijakan perpajakan dan retribusi yang dapat memaksimalkan penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Tegal”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2020-2024?
2. Bagaimana efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tegal. Selain itu, penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan keterampilan dalam analisis data, penyusunan laporan, serta aplikasi teori ekonomi dalam konteks pemerintahan daerah.

2. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal

Manfaat penelitian ini bagi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal adalah sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan pajak daerah serta retribusi daerah yang diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat digunakan untuk merancang strategi peningkatan PAD yang lebih optimal.

3. Bagi Politeknik Harapan Bersama

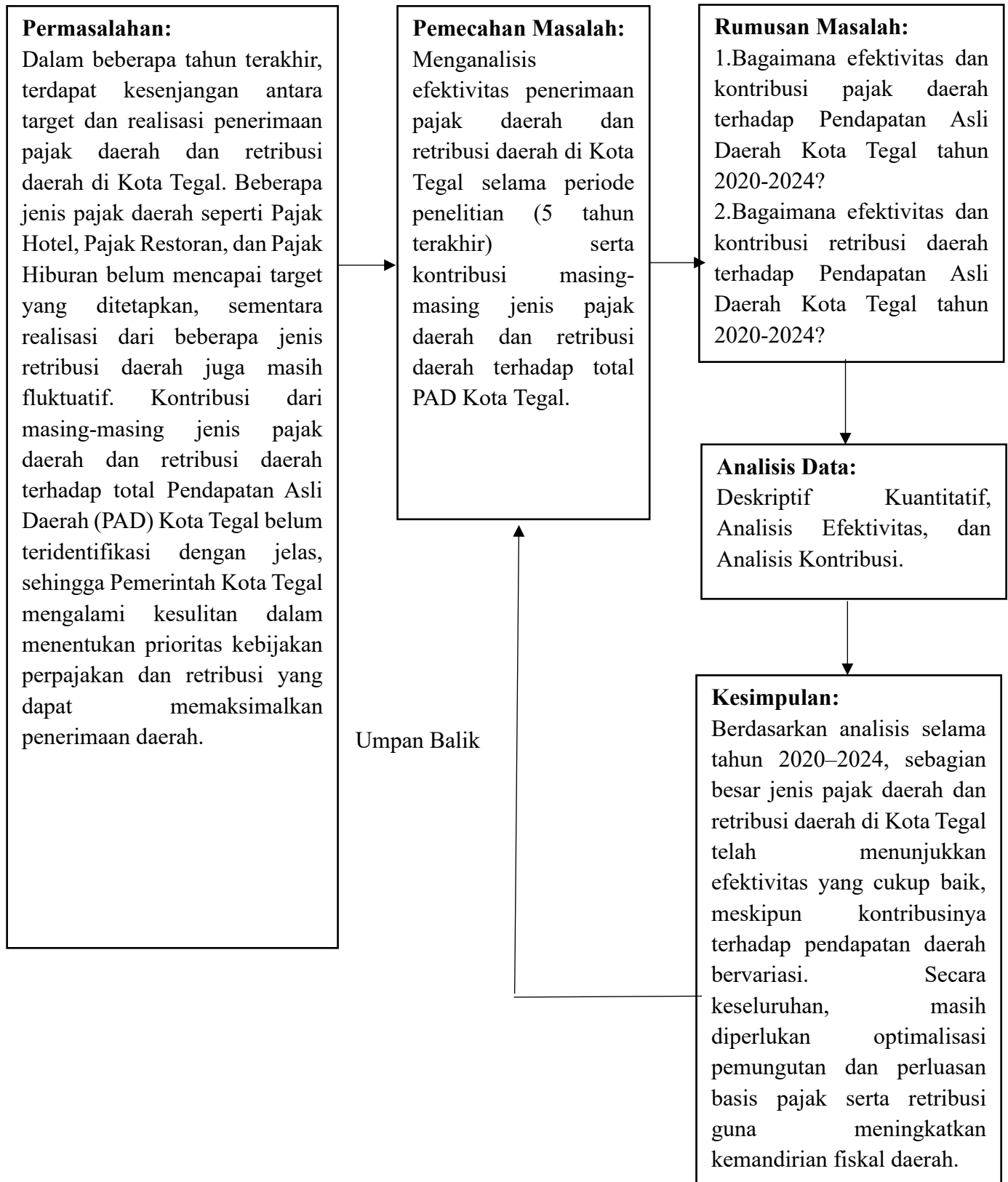
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dijadikan pengalaman praktis bagi mahasiswa program studi DIII Akuntansi, sehingga meningkatkan keterampilan analitis dan penelitian mereka.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dicakup dalam penelitian ini yaitu berfokus pada efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Tahun 2020-2024.

1.6 Kerangka Berpikir

Kota Tegal dengan posisi strategisnya memiliki potensi ekonomi yang seharusnya dapat menghasilkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang optimal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tegal. Beberapa jenis pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan belum mencapai target yang ditetapkan, sementara realisasi dari beberapa jenis retribusi daerah juga masih fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal belum teridentifikasi dengan jelas, sehingga Pemerintah Kota Tegal mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas kebijakan perpajakan dan retribusi yang dapat memaksimalkan penerimaan daerah. Di tengah kebutuhan anggaran yang semakin besar untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, penting bagi Pemerintah Kota Tegal untuk mengetahui tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi dari setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah dipahami dan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bagian ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan penelitian. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berpikir atau acuan melakukan penelitian. Teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan Alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain Kartu Konsultasi dan Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.